



**KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2026

Periode: April – Juni 2026

**BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JAWA IV**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Triwulan II ini disusun sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Jawa IV selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Laporan ini memuat capaian kinerja triwulanan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 untuk lima Perjanjian Kinerja dengan unit eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja yang efektif dalam rangka mencapai target kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai BP3KP Jawa IV dan pemangku kepentingan terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Surabaya, 9 Juli 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV



Enfy Diana Dewi, S.T., M.U.P.
NIP. 197605132005022001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas dan Fungsi.....	5
C. Struktur Organisasi	7
BAB II CAPAIAN KINERJA	11
A. Target Kinerja Triwulan II	11
B. Perubahan Target dan Revisi DIPA pada Triwulan II.....	15
C. Metode Pengukuran Kinerja	28
D. Capaian Target Kinerja Triwulan II	30
E. Capaian Target Keuangan Triwulan II	39
E. Permasalahan / Faktor Keberhasilan.....	40
BAB III PENUTUP	44
A. Rencana Tindak Lanjut.....	44
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan	10
Tabel 1. 2 Pegawai Berdasarkan Golongan	10
Tabel 1. 3. Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1. 4 Distribusi PNS dan PPPK BP3KP Jawa IV	10
Tabel 2. 1 DIPA Revisi 01 Acuan Perjanjian Kinerja Awal	11
Tabel 2. 2 Target Kinerja Triwulan II pada Rencana Aksi Kinerja	12
Tabel 2. 3 Daftar Perubahan Revisi DIPA BP3KP Jawa IV	15
Tabel 2. 4 Daftar Perubahan Revisi DIPA Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur	17
Tabel 2. 5 Perubahan Target Kinerja Triwulan II	23
Tabel 2. 6 Rincian Capaian Target Kinerja Triwulan II	30
Tabel 2. 7 Tabel 2. 7 Capaian Target Keuangan Triwulan II Berdasarkan Unit Organisasi	39
Tabel 2. 8 Realisasi Keuangan Triwulan II Terhadap Pagu PK Awal	39
Tabel 2. 9 Permasalahan BP3KP Jawa IV Triwulan II	40
Tabel 3. 1 Rencana Tindak Lanjut BP3KP Jawa IV Periode TW III	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan SOTK UPT BP3KP Jawa IV	7
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BP3KP Jawa IV	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat konstitusional ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab langsung dalam mengeksekusi program dan kegiatan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara terencana, terukur, dan akuntabel, telah ditetapkan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2026 sebagai instrumen perencanaan operasional.

Laporan Kinerja Triwulan II ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan periode Januari–Maret 2026, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Laporan ini memuat capaian kinerja dibandingkan dengan target Triwulan II yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Rencana Aksi Kinerja, serta menginventarisir permasalahan dan rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tugas BP3KP Jawa IV adalah:

"Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitas serah terima aset."

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP3KP Jawa IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

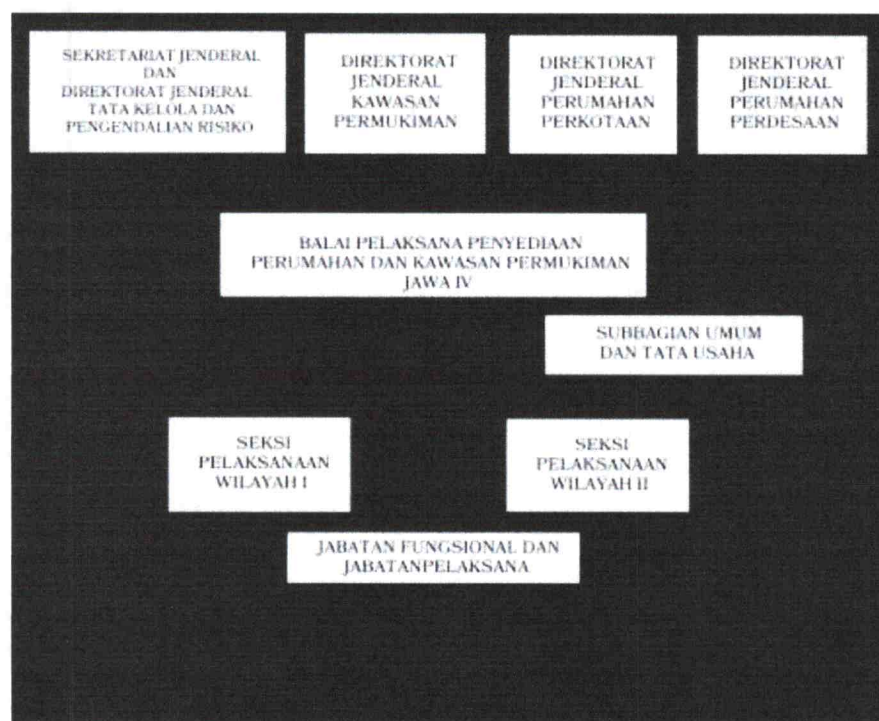
1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025, BP3KP Jawa IV secara garis komando bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Pada Tahun 2026, Kepala BP3KP Jawa IV dijabat secara definitif oleh Ibu Enfy Diana Dewi, S.T., M.U.P berdasarkan penetapan SK Nomor 16/KPTS/M/2026 tanggal 11 Maret 2026. BP3KP Jawa IV dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahi Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan Wilayah II, Kelompok Jabatan Fungsional, serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1. 1 Bagan SOTK UPT BP3KP Jawa IV

BP3KP Jawa IV dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahi beberapa unit kerja fungsional dan administratif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Balai dibantu oleh koordinator-koordinator bidang yang bertanggung jawab atas masing-masing kelompok program. Tugas dan fungsi pada struktur organisasi BP3KP Jawa IV sebagaimana berikut:

a. Kepala Balai

Mempunyai tugas sebagai penanggung jawab utama pelaksana seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah Jawa IV (Wilayah kerja Provinsi Jawa Timur).

b. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksana Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas:

- 1). Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; serta
- 2). Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitas penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

d. Seksi Pelaksana Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

f. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

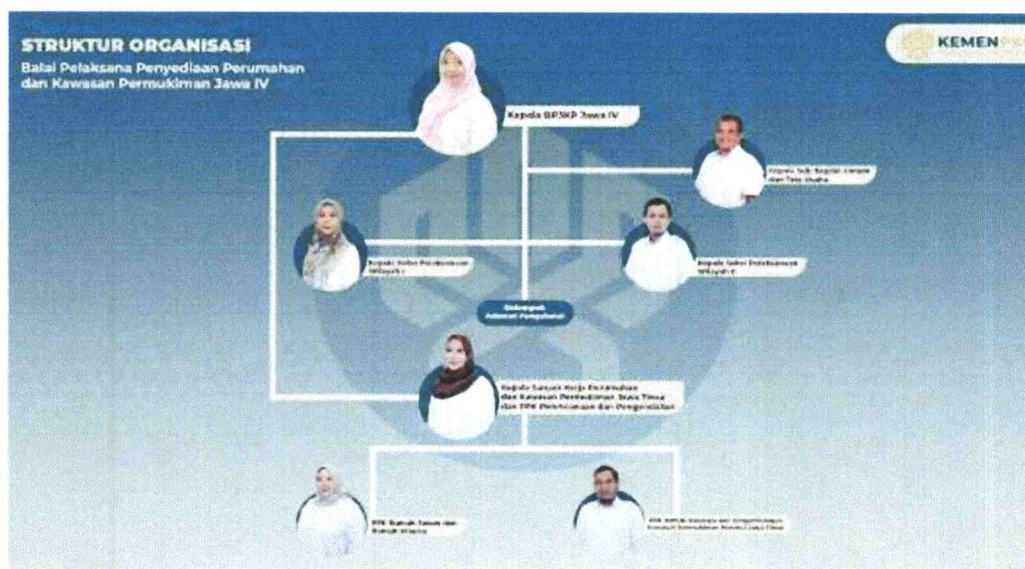
Kasatker bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana fisik di bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

g. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bertanggungjawab pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penanganan permukiman kumuh.

h. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

Bertanggungjawab pelaksanaan pembangunan bantuan rumah susun dan rumah khusus.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BP3KP Jawa IV

Sumber Daya Manusia (SDM)

BP3KP Jawa IV dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh kapasitas sumber daya manusia sebanyak 116 orang ASN. Dukungan pegawai tersebut dengan komposisi

mencakup 115 pegawai PNS dan PPPK *Full Time* yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada berbagai jenjang jabatan, serta 1 orang PPPK Paruh Waktu yang turut mendukung efektivitas organisasi. Adapun rincian komposisi pegawai BP3KP Jawa IV sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan

No	Status Pegawai	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		<SMA	D1-D3	D4/S1	S2	
1	PNS	1	0	45	15	61
2	PPPK	18	4	31	2	55
Total		19	4	76	17	116

Sumber: BP3KP Jawa IV, 2026

Tabel 1. 2 Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Status Pegawai	Golongan													Jumlah
		II/c	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	I	III	V	VII	IX	IX	
1	PNS	1	35	8	6	5	5	1	0	0	0	0	0	0	61
2	PPPK	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	4	30	3	54
Total		1	35	8	6	5	5	1	1	2	14	4	30	3	115

Sumber: BP3KP Jawa IV, 2026

Berdasarkan tabel 1.2, pegawai yang memiliki golongan sejumlah 115 orang yang terdiri dari pegawai PNS dan PPPK *Full Time*. Sedangkan terdapat 1 orang pegawai PPPK Paruh Waktu yang tidak memiliki golongan pegawai.

Tabel 1. 3. Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Status Pegawai	Jabatan			Jumlah
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	PNS	51	6	4	61
2	PPPK	28	27	0	55
Total		4	79	33	4

Sumber: BP3KP Jawa IV, 2026

Tabel 1. 4 Distribusi PNS dan PPPK BP3KP Jawa IV

No	Unit Kerja/Satker	PNS	PPPK	Jumlah
1	BP3KP Jawa IV	26	21	47
2	Satker PKP Provinsi Jawa Timur	35	34	69
Total		28	61	55

Sumber: BP3KP Jawa IV, 2026

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. Target Kinerja Triwulan II

Target Kinerja Triwulan II merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang harus dicapai pada akhir Triwulan II, mengacu pada Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026. Target bersifat kumulatif dari awal tahun (Januari) hingga akhir Triwulan II. Berikut adalah ringkasan target Triwulan II untuk masing-masing Perjanjian Kinerja beberapa Unit Organisasi antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta mengacu berdasarkan petikan DIPA Revisi 01 tanggal 29 Desember 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. 1 DIPA Revisi 01 Acuan Perjanjian Kinerja Awal

No	Unit Organisasi	DIPA Revisi 01		Jumlah
		BP3KP Jawa IV	Satker PKP Provinsi Jatim	
1	Sekretariat Jenderal	1.403.110.000	830.402.000	2.233.512.000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	290.741.000	46.354.000	337.095.000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	548.907.000	11.288.865.000	11.837.772.000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	338.999.000	30.173.000	369.172.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	146.838.000	-	146.838.000

Tabel 2. 2 Target Kinerja Triwulan II pada Rencana Aksi Kinerja

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET PK AWAL	RINCIAN TARGET PK AWAL		TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%/unit)			
			BP3KP JAWA IV	SATKE R PKP PROV. JATIM	TW I	TW II	TW III	TW IV
UO	SEKRETARIAT JENDERAL							
P	DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV							
1	Jumlah Layanan Umum	2 layanan	1 Layanan	1 Layanan	10	40	70	100
2	Jumlah layanan perkantoran	2 layanan	1 Layanan	1 Layanan	8	22	60	100
3	Jumlah layanan sarana internal	2 unit	1 unit	1 unit	0	100	100	100
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN							
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni							
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 dokumen	1 dokumen	-	10	35	65	100
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	8	28	65	100
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman							
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 dokumen	1 dokumen	-	8	25	60	100
P	DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman							
1	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	-	8	30	65	100
2	Jumlah Layanan Umum	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	8	32	65	100
3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	-	10	32	65	100
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN							
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan							
1	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 rekomendasi kbijakan	1 rekomendasi kbijakan	-	10	30	65	100
2	Jumlah Unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	320 Unit	-	320 Unit	0	0	0	320
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 laporan	1 laporan	-	10	25	55	100
SK	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan							
1	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan	1 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	-	10	30	65	100

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET PK AWAL	RINCIAN TARGET PK AWAL		TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%/unit)			
		BP3KP JAWA IV	SATKE R PKP PROV. JATIM	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Kualitas Perumahan Perdesaan						
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan						
1	Jumlah Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	10	30	65 100
2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	-	10	25	55 100
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	10	25	55 100
SK	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perdesaan						
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	70 orang	70 orang	-	10	30	65 100
2	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	10	25	55 100
SK	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan di Wilayah Perdesaan						
1	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	-	10	30	65 100
2	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	-	10	30	65 100
P	DUKUNGAN MANAJEMEN						
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
1	Jumlah Layanan Umum	2 layanan	1 layanan	1 layanan	10	28	60 100
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan						
1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 layanan	1 layanan	-	10	35	65 100
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	10	25	55 100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	10	30	65 100
SK	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET PK AWAL	RINCIAN TARGET PK AWAL		TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%/unit)			
			BP3KP JAWA IV	SATKE R PKP PROV. JATIM	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	10	25	60	100
SK	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	10	30	60	100
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	10	30	65	100
SK	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	10	30	65	100
P	DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	-	10	30	60	100
2	Jumlah Layanan Umum	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5	20	50	100
3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	-	10	35	65	100
UO	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO							
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efektif dan Akuntabel							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	8	30	60	100
SK	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	-	8	30	63	100
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	8	30	65	100

B. Perubahan Target dan Revisi DIPA pada Triwulan II

Sepanjang triwulan kedua (April hingga Juni) Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan beberapa kali revisi DIPA serta penyesuaian target output, baik pada DIPA BP3KP Jawa IV maupun Satker PKP Provinsi Jawa Timur. Rincian serta kronologi perubahan DIPA dan penyesuaian target output tersebut disajikan secara detil pada tabel 2.5, tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 3 Daftar Perubahan Revisi DIPA BP3KP Jawa IV

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL			
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025 Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran)	Rp 1.403.110.000	Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 37.891.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp.1.198.818.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp. 166.401.000 ** (output tetap, pagu berubah)
2	POK Revisi 2 Tanggal 19 Februari 2026 Perihal : Pemutakhiran Halaman III DIPA	Rp 1.403.110.000	Revisi KANWIL Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 37.891.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp.1.198.818.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp. 166.401.000 ** (output tetap, pagu Tetap)
3	DIPA Revisi 3 Tanggal 19 Februari 2026 Perihal : Pemutakhiran Halaman III DIPA	Rp 1.403.110.000	Revisi KANWIL Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 37.891.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp.1.198.818.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp. 166.401.000 ** (output tetap, pagu Tetap)
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025 Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran)	Rp 290.741.000	Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Dipa petikan pertama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dengan Rincian Output (RO): - 7659.BMA Data dan Informasi Publik Rp. 30.299.000 - 7659.CBR Dukungan Teknis Rp.98.521.000 - 7659.PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Rp.97.177.000 - 7674.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 64.744.000 <i>(output tetap, pagu berubah)</i>
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025	Rp 548.907.000	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output (RO): - 660.ABF. PKebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 3 Rekomendasi Kebijakan Rp. 534.607.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum: 2 Layanan, Rp.14.300.000 <i>(output tetap, pagu berubah)</i>
2	DIPA Revisi 2 Tanggal 13 Februari 2026	Rp 365.897.000	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output (RO): - 660.ABF. PKebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 3 Rekomendasi Kebijakan Rp. 351.597.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum: 2 Layanan, Rp.14.300.000 <i>(output tetap, pagu berubah)</i>
3	DIPA Revisi 3 Tanggal 20 Februari 2026	Rp 365.897.000	Perihal : Revisi Kanwil Pagu Tetap Rincian Output (RO): - 660.ABF. PKebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 3 Rekomendasi Kebijakan Rp. 351.597.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum: 2 Layanan, Rp.14.300.000 <i>(output tetap, pagu berubah)</i>
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025	Rp 338.999.000,00	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output (RO): - 7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Rp. 220.491.000 - 7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rp. 46.583.000 - 7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 71.925.000 <i>(output tetap, pagu berubah)</i>

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
2	DIPA Revisi 2 Tanggal 13 Februari 2026	Rp 365.195.000,00	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output (RO): - 7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Rp. 274.491.000 - 7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rp. 46.583.000 - 7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 44.121.000 (output tetap, pagu berubah)
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025	Rp 146.838.000,00	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output (RO): - 7662.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Rp. 132.116.000 - 7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rp. 14.722.000 (output tetap, pagu berubah)

Tabel 2. 4 Daftar Perubahan Revisi DIPA Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL			
1	DIPA Revisi 3 14 April 2026	Rp 830.402.000,00	Perihal : Pemutakhiran Hal III DIPA List Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp11.853.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp707.615.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp.110.934.000 *output tetap, pagu tetap
2	DIPA Revisi 4 07 Mei 2026	Rp 830.402.000,00	Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III DIPA List Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp11.853.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp707.615.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp.110.934.000 *output tetap, pagu tetap

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
3	DIPA Revisi 5 3 Juni 2026	Rp 830.402.000,00	Perihal Revisi : Perubahan Rincian Anggaran (Lintas Komponen) List Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp11.853.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp707.615.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp.110.934.000 *output tetap, pagu tetap
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
1	DIPA Revisi 4 24 April 2026	Rp 56.764.218.000	Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output: - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 2400 Unit, Rp. 56.719.105.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output tetap, pagu berubah)
2	DIPA Revisi 5 Tanggal 28 April 2026	Rp69.694.344.000	Revisi DJA (Penambahan Anggaran dan Penambahan KRO) Rincian Output: - 7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun : 1 unit ; Rp 12.930.126.000 - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 2400 Unit, Rp. 56.719.105.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output berubah, pagu berubah)
3	DIPA Revisi 6 Tanggal 11 Mei 2026	Rp69.694.344.000	Revisi POK (Pergeseran Alokasi Anggaran dan Perubahan Item) Rincian Output: - 7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun : 1 unit ; Rp 12.930.126.000 - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 2400 Unit, Rp. 56.719.105.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output tetap, pagu tetap)

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
4	DIPA Revisi 7 Tanggal 26 Mei 2026	Rp155.996.115.000	Revisi DJA (Penambahan Anggaran) Rincian Output: - 7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun : 1 unit ; Rp 12.930.126.000 - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 6588 Unit, Rp. 143.020.876.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output berubah, pagu berubah)
5	DIPA Revisi 8 Tanggal 29 Juni 2026	Rp155.996.115.000	Revisi POK (Pemecahan Rincian Fisik dan Wasdal BSPS menjadi 2 PPK) Rincian Output: - 7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun : 1 unit ; Rp 12.930.126.000 - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 6588 Unit, Rp. 143.020.876.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output tetap, pagu tetap)
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
1	DIPA Revisi 4 Tanggal 8 April 2026	Rp152.354.082.000	Perihal : Revisi DJA (Penambahan Anggaran dan Perubahan KRO) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 100.004.000,00 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.106.143.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 137.651.622.000,00 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.184.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output berubah, pagu berubah)

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
2	DIPA Revisi 5 Tanggal 23 April 2026	Rp151.062.686.000	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 136.527.149.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu berubah)
3	DIPA Revisi 6 Tanggal 08 Mei 2026	Rp151.062.686.000	Perihal : Revisi POK (Pergeseran Alokasi Anggaran dan Perubahan Item) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 136.527.149.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
4	DIPA Revisi 7 Tanggal 18 Mei 2026	Rp151.062.686.000	Perihal : Revisi POK (Perubahan Item) dan Pemutakhiran Rencana Penyerapan Dana (Halaman III DIPA) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp.

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			136.527.149.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
5	DIPA Revisi 8 Tanggal 19 Mei 2026	Rp151.062.686.000	Perihal : Revisi POK (Perubahan Item) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 136.527.149.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
6	DIPA Revisi 9 Tanggal 9 Juni 2026	Rp305.216.692.000	Perihal : Revisi DJA (Penambahan Anggaran) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 13.686 Unit, Rp. 290.681.155.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output berubah, pagu berubah)
7	DIPA Revisi 10 Tanggal 24 Juni 2026	Rp305.216.692.000	Perihal : Pemutakhiran Revisi POK (Pemecahan Rincian Item Fisik dan Wasdal BPS menjadi 4 PPK) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			- 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 13.686 Unit, Rp. 290.681.155.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
8	DIPA Revisi 11 Tanggal 30 Juni 2026	Rp305.216.692.000	Perihal : Revisi DJA (Buka Blokir) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 13.686 Unit, Rp. 290.681.155.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
1	DIPA Revisi 4 Tanggal 23 April 2026	Rp58.421.316.000	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output: - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 18.133.000 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 2700 Unit, Rp. 58.390.726.000 - 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 (output tetap, pagu berubah)
2	DIPA Revisi 5 Tanggal 16 Mei 2026	Rp58.421.316.000	Perihal : Pemutakhiran Rencana Penyerapan Dana (Halaman III DIPA) Rincian Output: - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 18.133.000 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 2700 Unit, Rp. 58.390.726.000 - 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 (output tetap, pagu tetap)
3	DIPA Revisi 6 Tanggal 17 Juni 2026	Rp82.248.786.000	Perihal : Revisi DJA (Penambahan Anggaran) Rincian Output: - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 18.133.000 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 3.800 Unit, Rp. 82.218.196.000 - 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 (output berubah, pagu berubah)
4	DIPA Revisi 7 Tanggal 29 Juni 2026	Rp82.248.786.000	Perihal : Revisi DJA (Buka Blokir) Rincian Output: - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 18.133.000 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 3.800 Unit, Rp. 82.218.196.000 - 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 (output tetap, pagu tetap)

Tabel 2. 5 Perubahan Target Kinerja Triwulan II

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Keterangan
UO: SEKRETARIAT JENDERAL						
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV						
1	7665.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	layanan	2	40	Indikator PK Awal
2	7665.EBA.994	Jumlah layanan perkantoran	layanan	2	22	Indikator PK Awal

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Keterangan
3	7665.EBB.951	Jumlah layanan sarana internal	unit	2	100	Indikator PK Awal
UO: DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni						
4	7659.BMA.001	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	dokumen	1	35	Indikator PK Awal
5	7659.PBF.001	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	rekomendasi kebijakan	1	28	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman						
6	7659.CBR.002	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	dokumen	1	25	Indikator PK Awal
7	7660.RBB.004	Jumlah rumah susun yang terbangun	unit	Belum ada	0	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 4,1 unit
8	7659.RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	unit	Belum ada	2196	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 7, 6588 unit
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
9	7674.EBA.Z06	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	30	Indikator PK Awal
10	7674.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	32	Indikator PK Awal
11	7674.EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	32	Indikator PK Awal
UO: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan						
12	7660.ABF.007	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan	rekomendasi kebijakan	1	30	Indikator PK Awal

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Keterangan
		Perumahan Perdesaan				
13	7660.RBB.005	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	unit	320		Indikator dihapus pada DIPA Revisi 2
14	7660.RBB.001	Jumlah Unit Rumah yang Mendapatkan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perdesaan	unit	Belum ada	0	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 4, 260 unit
15	7660.FAE.004	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	laporan	1	25	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan						
16	7660.ABF.008	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	1	30	Indikator PK Awal
17	7660.RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	unit	Belum ada	4562	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 7, 16.686 unit
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan						
18	7660.RBB.006	Jumlah Rumah bersanitasi layak di Wilayah Perdesaan	unit	Belum ada	0	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 5, 200 unit
19	7660.RBB.011	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan	Ha	Belum ada	0	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 5, 15 Ha
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan						
20	7660.ABF.009	Jumlah Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan	rekomendasi kebijakan	1	30	Indikator PK Awal

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Keterangan
		Perumahan Perdesaan				
21	7660.BMA.001	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	25	Indikator PK Awal
22	7660.FAE.001	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	laporan	2	25	1 Target layanan dihapus pada DIPA Revisi 2 (Balai)
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perdesaan						
23	7660.AEF.001	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	orang	70		Indikator dihapus pada DIPA Revisi 2
24	7660.PEA.001	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	kegiatan	1		Indikator dihapus pada DIPA Revisi 2
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan di Wilayah Perdesaan						
25	7660.CBR.001	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	dokumen	1		Indikator dihapus pada DIPA Revisi 2
26	7660.CBR.002	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	1		Indikator dihapus pada DIPA Revisi 2
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN						
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
27	7675.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	layanan	2	28	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan						
28	7675.EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi	layanan	1	35	Indikator PK Awal
UO: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Keterangan
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
29	7661.ABF.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	25	Indikator PK Awal
30	7661.FAE.001	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	laporan	2	30	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						
31	7661.ABF.002	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	25	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
32	7661.ABF.003	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	30	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
33	7661.ABF.004	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	30	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
34	7661.ABF.005	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	30	Indikator PK Awal
35	7661.RBB.008	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan	unit	Belum ada	1266	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 2, 3.800 unit

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Keterangan
		Kualitas di Perkotaan				
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
36	7676.EBA.956	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	Layanan	1	30	Indikator PK Awal
37	7676.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	20	Indikator PK Awal
38	7676.EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	35	Indikator PK Awal
UO: DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efektif dan Akuntabel						
39	7662.ABF.004	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	rekomendasi kebijakan	1	30	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
40	7662.ABF.005	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	rekomendasi kebijakan	2	30	Indikator PK Awal
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
41	7662.FAE.001	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	rekomendasi kebijakan	1	30	Indikator PK Awal

C. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian setiap indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026. Berdasarkan arahan Biro Perencanaan dan Kerja Sama (PKS) dan masing-masing Unit Organisasi pada Triwulan II pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu terhadap target pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal. Persentase capaian kinerja menunjukkan sejauh

mana realisasi telah memenuhi target yang ditetapkan, metode pengukuran dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target PK}) \times 100\%$$

Target triwulanan bersifat kumulatif, yaitu persentase pada setiap kolom triwulan merepresentasikan akumulasi capaian dari awal tahun (Januari) hingga akhir triwulan yang bersangkutan. Kategori capaian kinerja diklasifikasikan sebagai berikut:

Kategori/Intrepretasi	Nilai Capaian
Istimewa	Kinerja $\geq 100\%$
Baik	$90\% < \text{Kinerja} < 100\%$
Butuh Perbaikan	$70\% < \text{Kinerja} < 89\%$
Kurang	$61\% < \text{Kinerja} < 69\%$
Sangat Kurang	Kinerja $< 60\%$

Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator kinerja. Selisih atau gap antara realisasi dan target dinyatakan dalam bentuk deviasi, yang diukur dalam satuan persentase poin (pp), dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Deviasi} = \text{Realisasi} - \text{Target PK}$$

Nilai deviasi diinterpretasikan sebagai berikut:

- **Deviasi positif (+)** menunjukkan capaian kinerja **melampaui** target;
- **Deviasi nol (0)** menunjukkan capaian kinerja **sesuai** target;
- **Deviasi negatif (-)** menunjukkan capaian kinerja **berada di bawah** target (belum tercapai).

D. Capaian Target Kinerja Triwulan II

Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV sebagai entitas gabungan dari Satker BP3KP Jawa IV dan Satker PKP Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi TA 2026. Evaluasi capaian kinerja diukur secara triwulanan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dan target kinerja yang telah direncanakan.

Tabel 2. 6 Rincian Capaian Target Kinerja Triwulan II

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
UO: SEKRETARIAT JENDERAL										
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV										
1	7665.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	layanan	2	40	94.87	237.18	54.87	Indikator PK Awal	Istimewa
2	7665.EBA.994	Jumlah layanan perkantoran	layanan	2	22	35.06	159.38	13.06	Indikator PK Awal	Istimewa
3	7665.EBB.951	Jumlah layanan sarana internal	unit	2	100	100.00	100	0.00	Indikator PK Awal	Istimewa
UO: DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN										
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni										
4	7659.BMA.001	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan	dokumen	1	35	42.57	121.63	7.57	Indikator PK Awal	Istimewa

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
		Kawasan Permukiman								
5	7659.PBF.001	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	rekomendasi kebijakan	1	28	89.5	319.64	61.50	Indikator PK Awal	Istimewa
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman										
6	7659.CBR.002	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	dokumen	1	25	65	260	40.00	Indikator PK Awal	Istimewa
7	7660.RBB.004	Jumlah rumah susun yang terbangun	unit	Belum ada	0	0	0	0	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 4,1 unit	Sangat Kurang (belum ada target di TW II)
8	7659.RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	unit	Belum ada	2196	5	0.23	-2191	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 2 2.400 unit	Sangat Kurang
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
9	7674.EBA.Z06	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	30	95.22	317.40	65.22	Indikator PK Awal	Istimewa
10	7674.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	32	76	237.50	44.00	Indikator PK Awal	Istimewa
11	7674.EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	32	99.42	310.69	67.42	Indikator PK Awal	Istimewa
UO: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN										
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan										
12	7660.ABF.007	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	1	30	14	45.47	-16.36	Indikator PK Awal	Sangat Kurang
14	7660.RBB.001	Jumlah Unit Rumah yang Mendapatkan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perdesaan	unit	0	0	0	0	0	Indikator baru sesuai DIIPA Revisi 4, 260 unit	Sangat Kurang (belum ada target di TW II)
15	7660.FAE.004	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	laporan	1	25	11.92	47.68	-13.08	Indikator PK Awal	Sangat Kurang

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan										
16	7660.ABF.008	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	1	30	2.87	9.57	-27.13	Indikator PK Awal	Sangat Kurang
17	7660.RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	unit	Belum ada	4562	7	0.15	-4555	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 7, 16.686 unit	Sangat Kurang
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan										
18	7660.RBB.006	Jumlah Rumah bersanitasi layak di Wilayah Perdesaan	unit	Belum ada	0	0	0	0	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 5, 200 unit	Sangat Kurang (belum ada target di TW II)
19	7660.RBB.011	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan	Ha	Belum ada	0	0	0	0	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 5, 15 Ha	Sangat Kurang (belum ada target di TW II)
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan										

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
20	7660.ABF.009	Jumlah Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	1	30	31.35	104.50	1.35	Indikator PK Awal	Istimewa
21	7660.BMA.001	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	25	33.66	134.64	8.66	Indikator PK Awal	Istimewa
22	7660.FAE.001	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	laporan	2	25	40.16	160.64	15.16	1 Target Laporan dihapus pada DIPA Revisi 2 (Balai)	Istimewa
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
27	7675.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	layanan	2	28	14.86	53.05	-13.14	Indikator PK Awal	Sangat Kurang
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
28	7675.EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi	layanan	1	35	85.73	244.95	50.73	Indikator PK Awal	Istimewa
UO: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
29	7661.ABF.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	25	56.52	226.10	31.52	Indikator PK Awal	Istimewa
30	7661.FAE.001	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	laporan	2	30	54.05	180.16	24.05	Indikator PK Awal	Istimewa
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
31	7661.ABF.002	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	25	55.52	222.08	30.52	Indikator PK Awal	Istimewa
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan										

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
32	7661.ABF.003	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	30	56.51	188.37	26.51	Indikator PK Awal	Istimewa
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan										
33	7661.ABF.004	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	30	52.33	174.43	22.33	Indikator PK Awal	Istimewa
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
34	7661.ABF.005	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	rekomendasi kebijakan	1	30	63.51	211.7	33.51	Indikator PK Awal	Istimewa
35	7661.RBB.008	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	unit	Belum ada	1266	36	2.84	-1,230	Indikator baru sesuai DIPA Revisi 2, 3.800 unit	Sangat Kurang

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
36	7676.EBA.956	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	Layanan	1	30	2	6.67	-28.00	Indikator PK Awal	Sangat Kurang
37	7676.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	20	16.11	80.56	-3.89	Indikator PK Awal	Butuh Perbaikan
38	7676.EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	35	70.32	200.91	35.32	Indikator PK Awal	Istimewa
UO: DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO										
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efektif dan Akuntabel										
39	7662.ABF.004	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	rekomendasi kebijakan	1	30	31.46	104.87	1.46	Indikator PK Awal	Istimewa
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
40	7662.ABF.005	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan	rekomendasi kebijakan	2	30	40	133.33	10.00	Indikator PK Awal	Istimewa

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target TW II (%/unit)	Realisasi TW II (%/unit)	Capaian TW II (%/unit)	Deviasi	Keterangan	Intepretasi Capaian
		Pencegahan Korupsi								
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman										
41	7662.FAE.001	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	rekomendasi kebijakan	1	30	40	133.33	10.00	Indikator PK Awal	Istimewa

E. Capaian Target Keuangan Triwulan II

Pada Triwulan II BP3KP Jawa IV mengelola anggaran kumulatif melalui 2 (dua) program strategis, yaitu **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman** serta **Program Dukungan Manajemen**. Total realisasi keuangan untuk seluruh Unit Organisasi (Unor) dari DIPA dua entitas Satker BP3KP Jawa IV dan Satker PKP Provinsi Jawa Timur pada Triwulan II adalah sebesar **Rp 144.656.505.256** dari pagu anggaran awal (PK Awal) sebesar **Rp 14.970.742.000**, atau setara 966,28% dari pagu awal.

Berikut adalah penjelasan capaian target keuangan Triwulan II pada masing-masing DIPA Unit Organisasi.

Tabel 2. 7 Tabel 2. 7 Capaian Target Keuangan Triwulan II Berdasarkan Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Target Keu TW II (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	% Capaian Keu TW II
1	Sekretariat Jenderal	Rp716.647.860	Rp950.452.288	132,62%
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp97.575.820	Rp22.111.308.051	22660,64%
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp169.610.410	Rp114.115.993.275	67281,24%
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp338.999.000	Rp7.469.171.142	2203,30%
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rp44.051.400	Rp12.580.500	28,56%
TOTAL		Rp1.366.884.490	Rp144.659.505.256	10583,16%

Berikut gambaran Realisasi terhadap Pagu Awal (PK Awal) mencerminkan progres serapan riil terhadap pagu tahunan dan capaian target keuangan TW II pada DIPA revisi berjalan.

Tabel 2. 8 Realisasi Keuangan Triwulan II Terhadap Pagu PK Awal

No.	Unit Organisasi	Program	Pagu Awal (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	% thd Pagu Awal
1	Sekretariat Jenderal	Dukungan Manajemen	Rp2.233.512.000	Rp950.452.288	42,55%
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp225.997.000	Rp22.073.448.951	9767,14%
		Dukungan Manajemen	Rp157.452.000	Rp37.859.100	24,04%
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp11.805.220.000	Rp114.112.032.275	966,62%
		Dukungan Manajemen	Rp32.552.000	Rp3.961.000	12,17%
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp285.790.000	Rp7.455.627.931	2608,78%
		Dukungan Manajemen	Rp83.382.000	Rp13.543.211	16,24%

No.	Unit Organisasi	Program	Pagu Awal (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	% thd Pagu Awal
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp146.838.000	Rp12.580.500	8,57%
TOTAL			Rp14.970.743.000	Rp144.659.505.256	966,28%

E. Permasalahan / Faktor Keberhasilan

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan/kendala serta faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Permasalahan/Kendala

Tabel 2. 9 Permasalahan BP3KP Jawa IV Triwulan II

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian TW II (%/unit)	Intrepretasi Capaian	Permasalahan
UO: DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN					
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman					
1	7660.RBB.004	Jumlah rumah susun yang terbangun	0	Sangat Kurang	1. Lahan usulan pembangunan rumah susun belum siap bangun karena masih memerlukan pematangan lahan. 2. Beberapa dokumen kesiapan pelaksanaan konstruksi belum lengkap, yaitu surat keterangan tanah tidak dalam sengketa serta surat konfirmasi lapangan terkait risiko bencana dan kesesuaian dengan peraturan bangunan gedung
2	7659.RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	0.23	Sangat Kurang	1. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan masih mengalami keterlambatan akibat belum tersedianya data CPB/BNBA pengganti. 2. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), masih belum mencukupi kebutuhan

					pelaksanaan di lapangan. 3. Pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah hambatan, antara lain lokasi penerima yang saling berjauhan, keterlambatan distribusi material akibat terbatasnya pasokan, keterbatasan tenaga kerja, serta menurunnya kemampuan swadaya masyarakat pada tahap akhir pembangunan.
UO: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN					
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan					
3	7660.ABF.007	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	45.47	Sangat Kurang	Belum optimalnya identifikasi isu strategis dan peraturan pembangunan perumahan perdesaan
4	7660.RBB.001	Jumlah Unit Rumah yang Mendapatkan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perdesaan	0	Sangat Kurang	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II
5	7660.FAE.004	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	47.68	Sangat Kurang	Belum terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan					
6	7660.ABF.008	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	9.57	Sangat Kurang	Belum optimalnya identifikasi isu strategis dan peraturan pembangunan perumahan perdesaan
7	7660.RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	0.15	Sangat Kurang	1. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan masih mengalami keterlambatan akibat belum tersedianya data CPB/BNBA pengganti. 2. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

					3. Pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah hambatan, antara lain lokasi penerima yang saling berjauhan, keterlambatan distribusi material akibat terbatasnya pasokan, keterbatasan tenaga kerja, serta menurunnya kemampuan swadaya masyarakat pada tahap akhir pembangunan.
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan					
8	7660.RBB.006	Jumlah Rumah bersanitasi layak di Wilayah Perdesaan	0	Sangat Kurang	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II
9	7660.RBB.011	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan	0	Sangat Kurang	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
10	7675.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	53.05	Sangat Kurang	
11	7661.RBB.008	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	2.84	Sangat Kurang	1. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan masih mengalami keterlambatan akibat belum tersedianya data CPB/BNBA pengganti. 2. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan di lapangan. 3. Pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah hambatan, antara lain lokasi penerima yang saling berjauhan, keterlambatan distribusi material akibat terbatasnya pasokan, keterbatasan tenaga kerja, serta menurunnya kemampuan swadaya masyarakat pada tahap akhir pembangunan.

Program: DUKUNGAN MANAJEMEN					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
12	7676.EBA.956	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	6.67	Sangat Kurang	Layanan BMN belum maksimal sehingga capaian hanya mencapai 6.67%
13	7676.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	80.56	Butuh Perbaikan	Layanan Umum belum maksimal sehingga capaian hanya mencapai 80.56%

BAB III PENUTUP

A. Rencana Tindak Lanjut

Mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan identifikasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat pencapaian target, disusun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Triwulan III (Juli–September 2026) sebagai upaya perbaikan dan percepatan kinerja. Rencana tindak lanjut ini mencakup langkah-langkah strategis dan operasional guna mengatasi kendala yang ada, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal, akuntabel, dan tepat waktu.

Rencana tindak lanjut tersebut disajikan secara rinci dalam tabel 3.1, yang memuat uraian permasalahan yang teridentifikasi pada Triwulan II, langkah tindak lanjut tersebut akan dilaksanakan pada rencana tindak lanjut Triwulan III dengan lebih efektif sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

Tabel 3. 1 Rencana Tindak Lanjut BP3KP Jawa IV Periode TW III

No	Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian TW II (%/unit)	Intepretasi Capaian	Permasalahan	Tindak Lanjut
UO: DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman						
1	7660.RBB.004	Jumlah rumah susun yang terbangun	0	Sangat Kurang	1. Lahan usulan pembangunan rumah susun belum siap bangun karena masih memerlukan pematangan lahan. 2. Beberapa dokumen kesiapan pelaksanaan konstruksi belum lengkap, yaitu surat keterangan tanah tidak dalam sengketa serta surat konfirmasi lapangan terkait risiko bencana dan kesesuaian dengan peraturan bangunan gedung	Berkordinasi dengan pihak Penerima Manfaat untuk melakukan pematangan lahan dan melengkapi dokumen kesiapan pelaksanaan konstruksi
2	7659.RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	0.23	Sangat Kurang	1. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan masih mengalami keterlambatan akibat belum tersedianya data CPB/BNBA pengganti. 2. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan di lapangan. 3. Pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah hambatan, antara lain lokasi penerima yang saling berjauhan, keterlambatan distribusi material akibat terbatasnya pasokan, keterbatasan tenaga kerja, serta menurunnya kemampuan	1. Mempercepat proses verifikasi dan validasi data CPB/BNBA bersama pemerintah desa dan instansi pengusul. 2. Memenuhi kebutuhan TFL serta mempercepat penerbitan SK dan penempatan personel pada wilayah yang masih kekurangan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres pelaksanaan serta percepatan distribusi material agar target pelaksanaan BSPS dapat tercapai sesuai jadwal.

						swadaya masyarakat pada tahap akhir pembangunan.	
UO: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN							
Program: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan							
3	7660.ABF.007	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	45.47	Sangat Kurang	Belum optimalnya identifikasi isu strategis dan peraturan pembangunan perumahan perdesaan	Mengikuti kegiatan terkait kebijakan dan peraturan pembangunan perumahan perdesaan di TW III	
4	7660.RBB.001	Jumlah Unit Rumah yang Mendapatkan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perdesaan	0	Sangat Kurang	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II	Pelaksanaan fisik baru akan berjalan pada TW III	
5	7660.FAE.004	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	47.68	Sangat Kurang	Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan perdesaan	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan perdesaan lebih optimal di TW III	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan							
6	7660.ABF.008	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	9.57	Sangat Kurang	Belum optimalnya identifikasi isu strategis dan peraturan pembangunan perumahan perdesaan	Mengikuti kegiatan terkait kebijakan dan peraturan pembangunan perumahan perdesaan di TW III	
7	7660.RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	0.15	Sangat Kurang	1. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan masih mengalami keterlambatan akibat belum tersedianya data CPB/BNBA pengganti. 2. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan di lapangan. 3. Pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah hambatan,	1. Mempercepat proses verifikasi dan validasi data CPB/BNBA bersama pemerintah desa dan instansi pengusul. 2. Memenuhi kebutuhan TFL serta mempercepat penerbitan SK dan penempatan personel pada wilayah yang masih kekurangan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres pelaksanaan serta percepatan	

					antara lain lokasi penerima yang saling berjauhan, keterlambatan distribusi material akibat terbatasnya pasokan, keterbatasan tenaga kerja, serta menurunnya kemampuan swadaya masyarakat pada tahap akhir pembangunan.	distribusi material agar target pelaksanaan BSPS dapat tercapai sesuai jadwal.
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan						
8	7660.RBB.006	Jumlah Rumah bersanitasi layak di Wilayah Perdesaan	0	Sangat Kurang	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II	Pelaksanaan fisik baru akan berjalan pada TW III, saat ini masih proses penyusunan DED
9	7660.RBB.011	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan	0	Sangat Kurang	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II	Pelaksanaan fisik baru akan berjalan pada TW III, saat ini masih proses pelaksanaan Seleksi (untuk paket Supervisi) dan Tender (untuk paket fisik)
Program: DUKUNGAN MANAJEMEN						
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
10	7675.EBA.962	Jumlah Layanan Umum	53.05	Sangat Kurang	1. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan masih mengalami keterlambatan akibat belum tersedianya data CPB/BNBA pengganti. 2. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan di lapangan. 3. Pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah hambatan, antara lain lokasi penerima yang saling berjauhan, keterlambatan distribusi material akibat terbatasnya pasokan, keterbatasan tenaga kerja, serta menurunnya kemampuan	1. Mempercepat proses verifikasi dan validasi data CPB/BNBA bersama pemerintah desa dan instansi pengusul. 2. Memenuhi kebutuhan TFL serta mempercepat pemberian SK dan penempatan personel pada wilayah yang masih kekurangan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres pelaksanaan serta percepatan distribusi material agar target pelaksanaan BSPS dapat tercapai sesuai jadwal. □
11	7661.RBB.008	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	2.84	Sangat Kurang		

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PERIODE TRIWULAN II TA. 2026

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV pada periode Triwulan II TA. 2026.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kabupaten BPS Kabupaten Pamekasan



Dokumentasi Kegiatan Monev Pelaksanaan BPS Kabupaten Pamekasan



Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Klinik PKP pada Expo Konstruksi Jawa Timur



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah di Provinsi Jawa Timur TA 2026



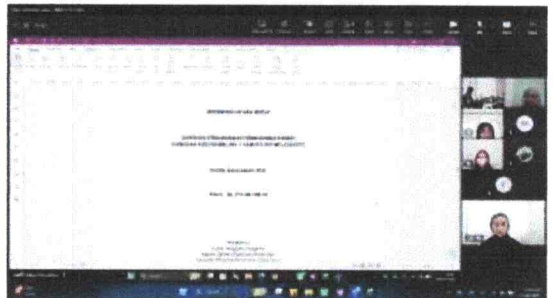
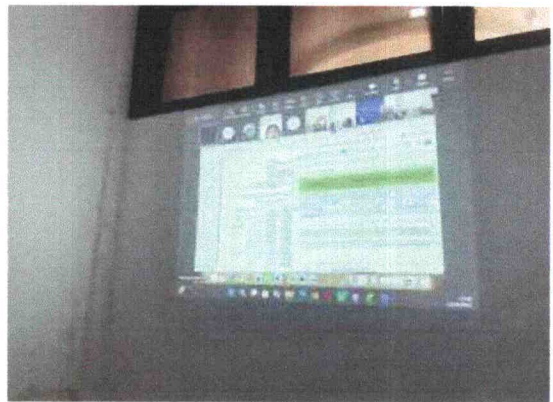
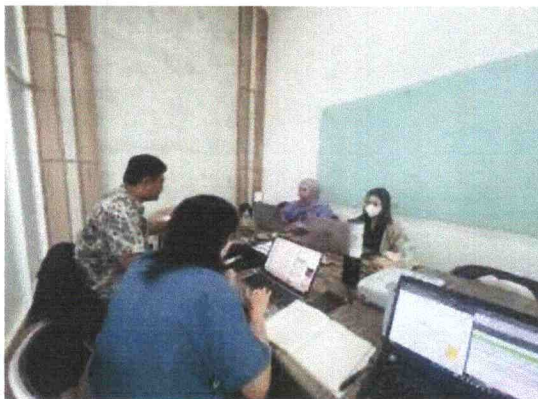
Dokumentasi Kegiatan Peninjauan Lokasi Usulan Pembangunan Rumah Susun TNI AL Kabupaten Pasuruan



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Program Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur



**Dokumentasi Kegiatan Rapat Progres Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Satuan Kerja PKP
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026**



**Dokumentasi Kegiatan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan (Sop4)
Paket Supervisi Dan Fisik Penanganan Permukiman Kumuh Kedungmaling 1**

Mojokerto



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dengan OPD Kab. Bangkalan terkait Pelaksanaan Kegiatan BPS TA 2026



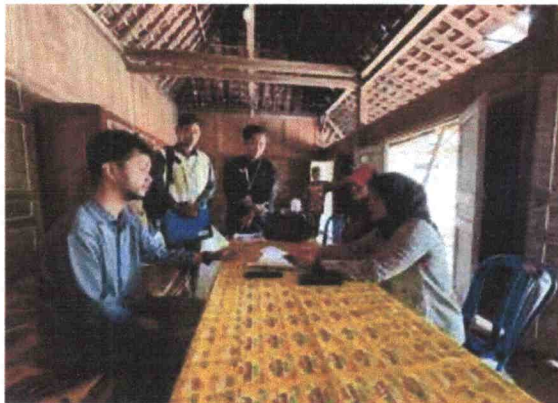
Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Lapangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Rumah Susun Pondok Pesantren Miftahul Ulum



Dokumentasi Kunjungan Lapangan Kegiatan BSPS di Kab. Lumajang



Dokumentasi Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program BSPS TA. 2026 di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang



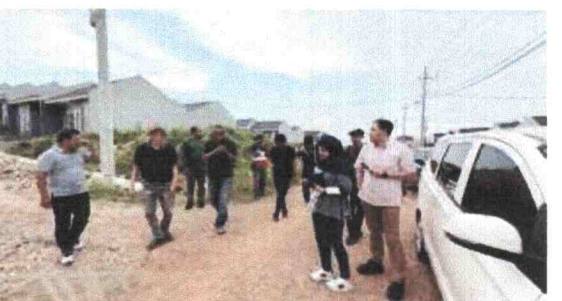
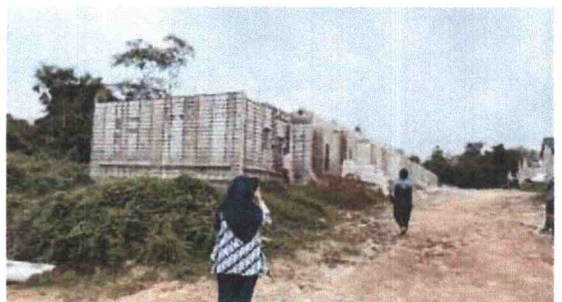
Dokumentasi Kegiatan Peninjauan Progres BSPS di Kab. Pacitan



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Penanganan Permukiman Kumuh di Mojokerto



Dokumentasi Kegiatan Peninjauan Progres BPS di Kab. Pacitan



Dokumentasi Kegiatan Peninjauan Rumah Subsidi di Kab. Bangkalan sebagai Persiapan Kunjungan Menteri PKP